**EFEKTIVITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DALAM MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH**

*Oleh : Suhartanto, Ak.MM.*

*(Widyaiswara Madya, Pusdiklat Pengawasan BPKP)*

***Abstrak:***

Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (kepala daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan keputusan manajerial pemerintah daerah. Namun demikian, sampai dengan saat ini, LKPD belum dapat secara efektif memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Kualitas informasi LKPD masih belum sepenuhnya memenuhi karakterisitk kualitatif informasi keuangan yaitu karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Salah satu komponen laporan keuangan yang sangat mempengaruhi pemenuhan kualitas informasi sesuai dengan karaketrisitik kualitatif tersebut adalah komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Oleh karena itu, peningkatan kualitas informasi yang disajikan dalam CaLK secara paripurna *(full disclosure presentation)* menjadi sangat penting, sehingga laporan keuangan (LKPD) dapat efektif mendukung manajer publik daerah dalam dasar pengambilan keputusan manajerial pemerintah daerah.

1. **Pendahuluan**

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemerintah Daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan manajerial di bidang pemerintahan daerah. Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan pentingnya dalam mendukung kegiatan manajemen pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun demikian, LKPD belum banyak digunakan oleh para penyelenggara pemerintahan daerah, baik DPRD maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota), dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen pemerintahan daerah. Selain disebabkan oleh *“paradigma politik”* yang lebih mendominasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah, kualitas LKPD sendiri juga menjadi penyebab belum berperannya LKPD sebagai sumber informasi keuangan daerah dalam pengambilan keputusan manajemen pemerintah daerah. LKPD belum mampu memberikan informasi keuangan yang informatif dan relevan dalam pengambilan keputusan manajemen Pemda.

Permasalahan tersebut di atas, mendorong penulis untuk mengkaji efektivitas peran LKPD dalam mendukung aktivitas manajemen pemerintahan daerah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengambilan keputusan. Kajian efektivitas peran LKPD dalam pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Daerah ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu literatur-literatur yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan serta laporan keuangan pemerintah daerah, serta literatur lainnya yang relevan.

Sistematika pembahasan permasalahan ini akan diawali dengan uraian teoritis tentang laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta pengambilan keputusan yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah berdasarkan laporan keuangan. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, pembahasan akan difokuskan pada praktik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini serta perbandingannya dengan landasan teoritis yang seharusnya. Pembahasan akan diakhiri dengan simpulan dan saran perbaikan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi informasi kebutuhan pengguna, khususnya manajemen pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan manajerial.

1. **Laporan keuangan : Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan**
2. **Peranan Laporan Keuangan**

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

1. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

1. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1. **Tujuan Laporan Keuangan**

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. **Komponen Laporan Keuangan**

Untuk memenuhi peran dan tujuan laporan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan keuangan yang disusun meliputi beberapa komponen laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

1. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
7. **Kebutuhan Informasi Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pemda**
8. **Kebutuhan Informasi Manajemen Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan UU 32 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masuyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan tersebut, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola seluruh sumber keuangan daerah untuk pencapaian tujuannya secara efektif, efisien dan ekonomis, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mengidentifikasikan kebutuhan informasi keuangan untuk pemerintahan daerah dapat dilakukan analisis memalui skema proses kegiatan (business process) Pemda berikut ini.

**Gambar : Proses Bisnis Penyusunan laporan keuangan**

Dari gambaran proses bisnis pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah sebagai manajer publik memerlukan informasikan keuangan untuk meningkatkan efektifivas proses manajemen pemda dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memberikan hasilkesejahteraan masyarakat.

Steven Cohen, et all (2011:196) mengidentifikasikan jenis kebutuhan informasi bagi manajer publik antara lain (a). Masalah data, (b). data lingkungan, (c). pilihan solusi, (d). Dampak solusi yang diproyeksikan, (e) tindakan internal, (f). pengeluaran sumber daya, (g). Keluaran yang dihasilkan, dan (h).dampak solusi aktual.

Salah satu kebutuhan informasi keuangan pemerintah daerah yang disediakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi keuangan tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah yaitu untuk menyusun perencanaan (anggaran), pelaksanaan program pemerintahan, serta keluaran *(output)* berupa posisi kekayaan daerah yang digunakan dalamupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara berkala, Manajer publik cq Kepala Daerah memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kekayaan dan keuangan daerah, dan pengambilan keptusan untuk melakukan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1. **Kualitas Informasi**

Informasi yang telah diperoleh hanya akan bermanfaat bagi manajer publik pemerintah daerah (Kepala Daerah) jika informasi tersebut memenuhi syarat kualitas tertentu. Informasi yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang berkualitas (*garbage in garbage out*). Oleh karena itu, kualitas informasi harus menjadi perhatian penting bagi manajer publik, jika manajer publik tidak ingin mengambil keputusan yang tidak tepat.

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, maka kualitas informasi keuangan telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (a). Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.

* Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
* Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
* Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
* Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
1. **Efektivitas Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan efektif apabila laporan keuangan tersebut dapat memenuhi tujuan dari diterbitkannya laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini, laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para manajer publik baik kepala daerah maupun DPRD dalam membuat keputusan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan akan dapat memenuhi tujuan penyusunannya, apabila informasi yang disajikannya memenuhi syarat-syarat kualitas yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu relevan, handal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

1. **Relevansi Laporan Keuangan dengan Pengambilan Keputusan Manajerial Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

* 1. **Laporan Realisasi Anggaran**
1. **Informasi keuangan yang disajikan dalam LRA**

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan penyajian LRA sebagaimana tersebut di atas, maka informasi keuangan yang disajikan antara lain:

* Informasi sumber pendapatan daerah yaitu sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta sumber dana lainnya (Pendapatan Daerah Lainnya yang sah).
* Informasi mengenai alokasi pendanaan per jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
* Informasi pembiayaan daerah yaitu sumber dana untuk menutup defisit anggaran serta optimalisasi dana surplus anggaran.
1. **Relevansi Informasi LRA dalam pengambilan keputusan**

Ditinjau dari karakteristik relevansi informasi infomasi keuangan terhadap pengambilan keputusan manajerial, maka penyajian LRA tersebut memberikan informasi yang memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)* dan manfaat prediktif *(predictive value)* dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen pemerintah daerah.

* Manfaat umpan balik *(feedback value)* antara lain tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah, penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan koreksi-koreksi atas kinerja keuangan masa lalu, serta dapat digunakan untuk melakukan koreksi atas perencanaan pada tahun berikutnya dalam mengalokasikan anggaran pada tahunberikutnya (proses anggaran). Namun demikian, manfaat tersebut akan dapat diperoleh oleh para pengguna atau pembaca laporan keuangan, apabila penyajian kuantitatif LRA tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu komponen laporan ekuangan pemerintah daerah. CALK harus memuat informasi tentang hambatan kendala pencapaian target pendapatan daerah atau penyerapan anggaran belanja untuk pelaksanaan program-program pemerintahan.
* Manfaat prediktif *(predictive value)* dapat diperoleh dari informasi pembiayaan surplus/defisit anggaran. Berdasarkan informasi tersebut, manajer publik daerah akan mampu mengalokasikan pembayaran angsuran pinjaman pada anggaran tahun berikutnya atau menaksir pendapatan daerah dari optimalissasi dana surplus. Sekali lagi, informasi LRA ini akan memberikan manfaat prediktif, apabila dilengkapi dengan informasi kualitatif yang disajikan dalam CALK. Informasi prediktif yang diperoleh dari ini antara lain tingkat beban bunga atas pinjaman yang digunakan dalampembiayaan defisit atau tingkat pendapatan bunga/ hasil yang akan diperoleh dari aktivitas optimalisasi dana surplus yang diinvestasikan.
1. **Keputusan Manajerial yang bersumber dari Informasi keuangan LRA**

Dari uraian ini, terlihat jelas betapa pentingnya informasi keuangan kualitatif yang disajikan dalam CALK agar informasi keuangan kuantitatif dalam LRA dapat memiliki manfaat baik prediktif maupun umpan balik dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Beberapa tindakan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh manajer publik antara lain :

* Keputusan dalam manajemen pendapatan daearah seperti seberapa jauh tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, keputusan tentang diperlukan atau tindaknya tindakan ekstensifikasi pajak, tindakan penagihan pajak dan retribusi serta penagihan pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
* Keputusan dalam manajemen belanja daerah, seperti efisisiensi belanja birokrasi yang semakin meningkat, efektivitas dan standarisasi belanja pegawai, belanja administrasi perkantoran, peningkataan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, dan pelayanan masyarakat pada umumnya
* Keputusan dalam manajemen pengelolaan pinjaman seperti keputusan tentang berapa pinjaman yang akan diperoleh serta tingkat suku bunga, serta besaran angsuran setiap tahun yang harus dilokasikan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.
* Keputusan dalam melakukan investasi optimalisasi dana surplus, seperti penyertaan modal pada BUMN, apakah akan ditingkatkan atau justru akan dialihkan pada investasi lainnya yang lebih mememberikan manfaat pendapatan bagi Pemda.
	1. **Neraca**
1. **Informasi keuangan yang disajikan dalam Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi yang dapat diperoleh dari format laporan keuangan berupa neraca antara lain :

* Informasi keuangan berupa kondisi aset lancar, seperti : kas, piutang, persediaan yang mempunyai masa manfaat dalam periode 12 bulan atau 1 tahun mendatang.
* Informasi keuangan tentang investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan informasi manfaat yang akan diperoleh pada periode 12 bulan berikutnya (investasi jangka pendek) maupun manfaat tahun-tahun selanjutnya (investasi jangkapanjang)
* Informasi keuangan tentang kondisi aset tetap, yang mempunyai manfaat ekonomis bagi penyelenggaraan pemerinmtahan dan pelayanan masyarakat pada masa mendatang
* Informasi keuangan tentang beban kewajiban yang harus diselesaikan pada periode jangka pendek maupun jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
* Informasi keuangan berupa ekuitas daerah yang mencerminkan nilai kekayaan bersih daerah pada tanggal neraca disusun.
1. **Relevansi Informasi Neraca dalam pengambilan keputusan**

Informasi keuangan yang disajikan dalam neraca tersebut, masih terbatas informasi keuangan kuantitatif yang mempunyai nilai manfaat umpan baik *(feedback value)* maupun nilai prediktif *(predictive value)*. Namun demikian, baik nilai umpan balik maupun prediktif ini tidak akan dapat diakses oleh para pengguna atau pembaca laporan keuangan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan manajerial. Manfaat prediktif dan umpan balik hanya akan dapat diakses, jika informasi keuangan kuantitatif dalam neraca disertai dengan penjelasan informasi kualitatif dalam CALK.

Informasi keuangan kualitatif yang perlu disajikan dalam CALK antara lain:

* Informasi kualitatif atas nilai aset lancar, berupa Kas/Setara Kas, piutang dan persediaan. Aset lancar mencerminkan tingkat likuiditas organsiasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya (periode kurang dari 12 bulan). Informasi kualitatif yang harus disajikan dalam CALK antara lain apakah posisi kas mampu untuk menutupi kebutuhan oiperasional pemerintah daerah dalam jangka pendek misalnya 3 bulan atau satu semester?; apakah kualitas persediaan masih dapat digunakan untuk operasional instansi dalam jangka pendek, misalnya untuk kebutuhan 1 bulan, 3 bulan atau 1 semester?; apakah piutang daerah dapat ditagih dalam jangka pendek untuk dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka pendek.
* Informasi kualitatif atas aset tetap yang merupakan sumber daya ekonomi yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. CALK seharusnya memberikan tambahan informasi kualitatif, seperti informasi tentang kualitas aktiva tetap, seperti : kondisi aset (Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat), tingkat perputaran (*turnover*) aset yang memberikan gambaran tingkat efektivitas atau kemampuan aset tertentu dalam menghasilkan pendapatan daerah, serta aset tetap lainnya yang belum atau tidak memberikan manfaat ekonomis pada masa mendatang
* Informasi kualitatif atas kewajiban yang merupakan jumlah pengorbanan sumber daya yang menjadi kewajiban Pemda untuk *menyelesaikannya* baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. CALK seharusnya memberikan tambahan informasi kualitatif tentang jumlah hutang pokok, tingkat suku bunga yang menjadi beban tahunan, lama angsuran pinjaman, serta ada atau tidaknya ikatan atas transaski hutang terhadap manajemen Pemda.
1. **Keputusan Manajerial yang bersumber dari Informasi keuangan LRA**

Beberapa tindakan pengambilan keputusan yang terkait dengan informasi keuangan dalam neraca

1. Pengambilan keputusan dalam manajemen likuiditas Pemda, antara lain :
* Keputusan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah, jika ternyata saldo kas daerah dalam neracaa tidak mencukupi likuiditas pemenuhan kewajiban operasionaljangka pendek
* Keputusan untuk melakukan optimalisasi dalam bentuk investasi jangka pendek atas saldo kas (seperti deposito), jika ternyata saldo kas melampaui jumlah minimal kebutuhan operasional jangka pendek ( misal, 3 bulan).
* Keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan penagihan saldo piutang untuk menutup kekurangan kas daerah memenuhi kebutuhan jangka pendek.
1. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset tetap, antara lain :
* Keputusan untuk melakukan tindakan optimalisasi aset tetap untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah yang lebih besar atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
* Keputusan untuk melakukan belanja pemeliharaan aset, rehabilitasi aset atau bahkan menghapuskan/menjual aset tersebut jika ternyata aset tetap justru membebani anggaran daerah.
* Keputusan untuk melakukan pengadaan aset seperti apakah perlu pengadaan aset baru? Atau akan lebih efektif jika dilakukan penyewaan aset dari pada pengadaan?
1. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan kewajiban/hutang
* Keputusan untuk melakukan pelunasan atau penjadwalan hutang jangka panjang
* Keputusan untuk melakukan tindakan penandatanganan hutang baru
	1. **Laporan Arus Kas ( LAK)**
1. **Informasi Keuangan yang disajikan dalam LAK**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas penerimaan dan penggunaan kas sesuai dengan kelompok penggunaannya yaitu: kas untuk aktivitas operasional, kas untuk aktivitas investasi aset non keuangan, kas untuk aktivitas pembiayaan, dan kas untuk aktivitas dan transaksi non-anggaran . Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan penerimaan kas yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah dan pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Dengan demikian, informasi yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas, memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan kas oleh Bendahara Umum Negara/Daerah, sebagai berikut :

* Arus kas aktivitas operasional : memberikan informasi sumber penerimaan dana untuk kegiatan operasional penmerintah dan penggunaannya. Sumber penerimaan berasal dari pendapatan asli daerah,pendapatan transfer dan pendapatan lainnya; sedangkan penggunaan kas digunakan untuk belanja operasional pemerintahan.
* Arus kas aktivitas investasi :memberikan informasi penerimaan dan penggunaan dana untuk kegiatan investasi yaitu pengadaan aset tetap untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Investasi ini harus dimanfaatkan hanya untuk pengadaan aset yang memrikan nilai tambah (benefit) pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
* Arus kas pembiayaan : memberikan infoprmasi penerimaan dan penggunaan dana yang terkait dengan aktivitas penerimaan pembiayaan untuk menutup kekurangan kas (defisit),maupun kelebihan kas (surplus)
* Arus kas non anggaran,memberikan informasi tentang pengelolaan penerimaan dan penggunaan kas yang berasal dari titipan pihak lain yang harus disetor kembali kepadapemiliknya dana tersebut,seperti kas utang pajak yang belum disetor.
1. **Relevansi Informasi LAK Dalam Pengambilan Keputusan**

Secara kuantitatif,LAK telah memberikan informasi yang bermanfaat umpan balik (*feedback value*) maupun manfaat prediktif (*predictive value*), khususnya bagi para bendahara umum daerah. LAK memberikan informasi dinamis atas pengelolaan kas daerah yaitu sumber perolehan dana (kas) maupun alokasi penggunaan dana (kas) menurut kelompok/klasifikasi penggunaannya.

* Manfaat umpan balik diinformasikan dari penerimaan dan alokasi sumber dana (kas) ,baik dari aktivitas operasional, investasi, pembiayaan maupun aktivitas non anggaran. Seperti sumber penerimaan yang digunakan untuk operasionalkegiatan pemerintahanserta alokasibelanjanya; sumber dan alokasi investasi aktiva tetap;serta sumber dan alokasidana(kas) dari SILPA.
* Sementara itu, informasi kenaikan kas dan saldo kas dapat memberikan informasi prediktif *(predictive value)*, sepeerti jumlah tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas investasi, jumlah dana yang tersedia untuk membayar hutang atau saldoi dana yang dapat diinvestasikan, informasi pelunasan utang dan jumlah investasi yang mampu menghasilkan pendapatan untukperiode berikutnya.

Namun demikian, informasi kuantitatif tersebut perlu mendapat tambahan informasi kaulitatif yang dituangkan dalam CALK. CALK perlu memberikan informasi tambahan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, seperti:

* Kebutuhan dana (kas) aktivitas operasional secara bulanan, sehingga dapat memberikan informasi apakah saldo kas (SILPA) cukup untuk membiayai aktivitas bulanan pada periode selanjunya.
* Alokasi dana (kas) untuk investasi agar dijelaskan jenis aset, kualitas (kondisinya) serta potensi untuk memberikan dampak keuangan daerah periode berikutnya maupun dampak pelayanan kepada masyarakat.
* Saldo kas dari aktivitas pembiayaan akan lebih memberikan informasi yang relevan jika ditambahkan informasi kualitatif dalam CALK tentang jumlah angsuran pokok hutang, proporsi penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D, sehingga mampu untuk menghitung proyeksi pendapatan pada masa yang akan datang.
1. **Keputusan Manajerial yang bersumber dari Informasi keuangan LRA**

Beberapa keputusan yang dapat diambilberdasarkan informasi laporan arus kas oleh manajer publik di daerah antara lain :

1. Keputusan pemanfaatan SILPA, apakah SILPA cukup digunakan untuk menutup kebutuhan kas jangka pendek (likuiditas) ?
* Jika SILPA tidak mencukupi kebutuhan likuiditas jangka pendek, misalnya kebutuhan operasional selama 3 bulan tahun anggaran pertama, maka bendahara umum daerah perlu mencari sumber pembiayaan yang murah atau meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
* Jika SILPA cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, bahkan melebihi kebutuhan likuiditas operasional jangka pendek, maka kepala daerah dapat memanfaatkan dana SILPA untuk meningkatkat program layanan masyarakat atau menginvestasikan kelebihan SILPA tersebut.
1. Keputusan investasi pemerintah daerah menambah investasi daerah atau membangun infrastruktur yang menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi bagi rakyat di daerah dengan memanfaatkan saldo dana (kas) lebih dari aktivitas investasi. Sebaliknya, jika terjadi, defisit dana saldo (kas) dari aktivitas investasi, maka informasi tersebut akan memberikan informasi terhadap pengambilan keputusan apakah pemerintah akan menunda investasi daerah atau menggunakan tabungan pemerintah (selisih lebih kas dari aktivitas operasional) untuk pelaksanaan program pelayanan masyarakat atau akan diinvestasikan ke pembiayaan lainnya.
2. Keputusan manajemen pembiayaan khususnya bagi bendahara umum daerah, apakah pemda akan melakukan penyertaan modal pemerintah, pelunasan hutang dan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah lainnnya, jika terjadi surplus dana (kas) dari aktivitas investasi. Namun demikian, jika terjadi defisit, maka bendahara umum dengan dukungan informasi keuangan, akan memutuskan apakah akan melakukan pinjaman atau tidak? Atau keputusan untuk segera menarik kembali pinjaman yang telah diberikan kepada pemda lainnya sebelum tanggal jatuh tempo.
	1. **Informasi yang disajikan dalam CaLK**
3. **Informasi Keuangan yang disajikan dalam LAK**

Sesuai dengan nama laporannya, maka Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif terhjadap komponen laporan keuangan lainnya yaitu LRA,Neraca dan LAK. Penjelasan naratif tersebut meliputi : penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangn lainnya, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Penyajian CALK yang lengkap dan informatif dalammemberikan penjelasanterhadap komponen laporan keuangan lainnya, serta informasi lainnya yang memberikan dasar penyusunan laporan keuangan lainnya, akan menyadikan seluruh laporan keuangan tersebut akan informatif dan memenuhi prinsip akuntansi penyajian paripurna (*full disclosure*).

Beberapa informasi yang dapat disajikan dalam CALK antara lain :

* informasi kinerja makro keuangan daerah : dalam bagian ini perlu disajikan dampak kinerja keuangan daerah (APBD) terhadap indikator makro ekonomi, seperti dampak APBD terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak APBN dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, peran APBD terhadap investasi daerah,peran APBD dalam peningktana kualitas infrastruktur daerah dan informasi makro ekonomi lainnya.
	+ ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan: perlu dilaporkan kinerja keuangan dalam bentuk analiais laporan keuangan yang menyajikan rasio kinerja keuangan, analissi kecenderungan dari tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi masa mendatang, analisis komparatif kinerja keuangan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah
	+ dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; bagian ini *perlu memberikan* informasimengenai rincian kuantitatif 3komponen laporan keuangan lainnya serta tambahan penjelasan yang jelas dan lengkap (fiull disclosure) atas masing-masing pos laporan keuangan;
	+ informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan ; seperti informasi yang mengungkapkan kemungkinan adanya transaski yang tidak patut *(irregularities)*, transaksi yang menyimpang peraturan (*illegal act*) yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap laporan keuangan
	+ informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; seperti informasi tentang beberapa potensi pendapatan yang belum tertagih, kewajiban bunga pinjaman yang belum jatuhtempo yang harus dibayarkan pada periode mendatang, dan informasilainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
1. **Relevansi Informasi LAK Dalam Pengambilan Keputusan**

CALK merupakan komponen laporan keuangan yang lebih dominan memberikan informasi keuangan kualitatif yang menjelaskan dan memberikan informasi latar belakang data-data kuantitatif yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Oleh karena itu, informasi dalam CALK sangat bermanfaat sekalibagi pembaca laporan keuangan untuk menjadikan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian dapat dikatakan, CALK sangat relevan dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, sepanjang informasi yang disajikan lengkap dan jelas serta terbuka (transparan).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, masih banyak dijumpai kelemahan pengungkapan informasi dalam CALK. CALK hanya menyajikan rincian daribeberapapos laporan keuangan, tidak memberikan informasi kualitatif, seperti latar belakang dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan. Dalam praktik, masih dijumpai CALK yang belum memberikan informasi yang jelas dan lengkap (*full disclosure*) sebagai landasan bagi para pembaca mengambil keputusan manajerial.

1. **Keputusan Manajerial yang bersumber dari Informasi keuangan LRA**

Informasi keuangan dalam CALK merupakan pendukung bagi komponen laporan keuangan lainya dalam pengambilan keputusan. Meskipun merupakan pendukung, informasi dalam CALK sangat vital dan menjadikan informasi kuantitatif dalam 3 komponen laporan keuangan lainnya dapat bernilai sebagai dasar pengambilan keputusan..

1. **Tingkat Keandalan Laporan Keuangan**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Drs. Hadi Poernomo menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 secara umum menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada semester I Tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 34 menjadi 67. Meskipun terjadi peningkatan, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut masih relatif kecil, yaitu baru 16% dari total LKPD. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP yaitu 77% dari total LKKL. Perbandingan opini tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan prosentase opini terhadap kewajaran laporan keuangan, kualitas LKKL relatif lebih baik dibandingkan dengan LKPD.

Opini BPK tersebut menunjukkan bahwa secara umum, laporan keuangan pemerintah daerah, belum dapat memberikan informasi keuangan yang handal, sehingga masih mengandung risiko besar bahwa informasi keuangan tersebut akan menyesatkan apabila digunakan manajer publik (Kepala Daerah dan DPRD) sebagai dasar pengambilan keputusan.

Salah satu faktor yang menentukan keandalan informasi laporan keuangan adalah karakterisitik penyajian informasi secara jujur. Kerangka konseptual menyatakan bahwa Informasi keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Praktik korupsi yang semakin marak di pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, seperti beberapa kasus kemahalan harga (*mark-up*) memberikan gambaran bahwa nilai aset dalam laporan keuangan (neraca) tidak disajikan decara jujur sebuah transaksi keuangan. Jika kasus korupsi terbukti melakukan *mark-up*, maka hasil kerugian keuangan negara yang dikembalikan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode kerugian keuangan negara/daerah tersebut dikembalikan ke kas negara/daerah; sedangkan nilai aset dalam neraca tidak dilakukan koreksi. Kondisi inilah yang memberikan gambaran bahwa informasi laporan keuangan, khususnya aset belum disajikan secara jujur, sehingga tingkat keandalan laporan keuangan sangat rendah dan pada akhirnya tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

1. **Daya Banding Laporan Keuangan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan mempunyai daya banding (*comparability*). Daya banding laporan keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Selain itu, daya banding dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kondisi daya banding (komparabilitas) laporan keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

* 1. Laporan keuangan pemerintah saat ini telah disajikan dengan komparabilitas pada periode tahun sebelumnya. Penyajian informasi ini hanya memberikan informasi adanya kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan dari tahun sebelumnya.
	2. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Kondisi tata kelola pemerintahan yang sering melakukan perubahan kebijakan pengelolaan dan transaksi keuangan daerah akan sangat mempengaruhi daya banding secara internal.
	3. Perbandingan secara eksternal yang membandingkan laporan keuangan pemda satu dengan pemda lain yang menerapkan kebijakan yang sama, hingga saat ini juga belum disajikan dalam laporan keuangan (catatan atas laporan keuangan). Hal ini anatara lain disebabkan hampir seluruh pemerintah daerah memiliki kebijakan dan sistem akuntansi yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan entitas pembanding (pemda lainnya) yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
1. **Pemahaman Pengguna Terhadap Laporan Keuangan**

Kerangka konseptual SAP menyatakan bahwa Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam hal pemahaman pengguna laporan keuangan ini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa para pengguna, terutama para pejabat publik pengelola pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD) banyak yang tidak mempunyai pemahaman terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan hanya secara formalitas digunakan sebagai dasar dalam memberikan pertanggungjawaban oleh kepala daerah dan menerima pertanggungjawaban oleh DPRD, sedangkan secara substansi, muatan informasi keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan belum mampu digali sebagai dasar pengambian keputusan untuk perbaikan periode mandatang.
2. Disisi lain, laporan keuangan belum memberikan informasi yang mudah difahami oleh pengguna. Laporan keuangan lebih dominan menyajikan data kuantitatif yang disajikan dengan pendekatan dan bahasa akuntansi dan belum disajikan dengan pendekatan bahasa manajerial. Oleh karena itu, perlu media penghubung yang dijadikan sarana antara bahasa akuntansi dengan bahasa manajerial, yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan, baik berupa analisis per komponen laporan keuangan (analisis rasio, analisis trend, dll) maupun analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi tingkat keekonomisan, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah.
3. **Simpulan dan Saran**
4. Salah satu peranan laporan keuagan adalah peran manajerial yang memberikan informasi keuangan bagi manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana serta pengambilan keputusan pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi manajemen tersebut, laporan keuangan disusun dalam bentuk dan format yang memudahkan untuk memberikan gambaran posisi keuangan, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah. Komponen laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Efektivitas laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial bagi pejabat publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) sangat tergantung pada kualitas informasi (karakterisitik kualitatif) yang disajikannya. Karakterisitik kualitatif informasi tersebut meliputi karakterisitik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.
* Karakteristik relevan terpenuhi apabila informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna
* Karakterisitik keandalan informasi apabila Informasi keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
* Informasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode, baik secara internal maupun eksternal
* Informasi akan bermanfaat apabila dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu informasi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan disisi lain, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami informasi keuangan yang disajikan.
1. Hingga saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum efektif dalam memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen publik di daerah (Kepala Daerah dan DPR). Kualitas informasi keuangan dalam LKPD belum memenuhi karakterisitik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dipahami.
* **Relevansi :** secara kuantitatif, informasi keuangan telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas melalui sistem akuntansi pemerintah daerah yang akurat. Namun demikian, informasi kuantitatif ini belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial, karena kurang didukung dengan informasi kualitatif yang seharusnya dapat disajikan secara paripurna (*full disclosure presentation*) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi keuangan yang disajikan dalam CALK hanya memuat rincian data kuantitatif dan belum memberikan informasi kualitatif yang memberikan penjelasan dan latar belakang dari angka-angka kualitatif dalamLKPD. Beberapa informasi kualitatif yang perlu diungkapkan dalam CALK antara lain: analisis laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, serta penjelasan yang melatar belakangi data-data keuangan yang disajikan.
* **Keandalan** : BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan semester I tahunn 2011 hanya memberikan Opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) terhadap 16 % LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, laporan keuangan pemerintah daerah, belum dapat memberikan informasi keuangan yang handal, dan masih mengandung risiko besar terjadi kesalahan jika informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
* **Dapat Diperbandingkan**: LKPD hanya menyajikan pembandingan data dengan LKPD tahun sebelumnya dan belum mampu memberikan daya banding secara internal maupun secara eksternal. Kebijakan pemerintah yang sering berubah terhadap transaksi keuangan daerah mengakibatkan LKPD belum bisa diperbandingkan secara internal. Disamping itu, perlakukan sistem dan prinsip akuntansi antar pemerintah daerah yang banyak berlainan, juga mengakibatkan daya banding LKPD secara eksternal belum dapat disajikan.
* **Dapat Dipahami** : Kemampuan pengguna untuk memahami informasi keuangan dalam LKPD masih sangat lemah, disamping LKPD sendiri tidak memberikan informasi yang mudah dicerna dan dipahami oleh pengguna yang secara akademis tidak memiliki pemahaman akuntansi. Penyusun LKPD seharusnya memberikan penjelasan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini dengan menguraikan analisis laporan keuangan serta analisis kinerja keuangn dalam komponen Catatan Atas Laporan Keuangan

.

1. Saran :

Sehubungan dengan permasalah tersebut di atas, untuk lebih meningkatkan efektivitas LKPD sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial pemerintah daerah, maka perlu ditingkatkan kualitas penyajian informasi keuangan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Catatan Atas Laporan Keuangan dalam memberikan pengungkapan informasi keuangan secara paripurna (*full disclosure presentation*). Penyajian informasi keuangan yang perlu dimuat dalam CALK antara lain :
* Informasi tentang analisis laporan keuangan, baik dalam bentuk analisis rasio per pos-pos laporan keuangan, analisis kecenderungan (analisis trend) pos-pos tertentu beberapa tahun terakhir,misaslnya 3 tahun terakhir, maupun analisis keuangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan informasi pemerintah daerah, seperti tingkat pembayaran bunga pinjaman, tingkat efektivitas penagihan piutang pendapatan daerah.
* Informasi tentang kinerja keuangan daerah yang menggambarkan tingkat keekonomisan penggunaan sumber daya keuangan daerah, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta tingkat efektivitas alokasi keuangan daerah dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran.
* Informasi kualitatif atas penjelasan pos-pos laporan keuangan, seperti informasi kualitas aset tetap (baik, rusak ringan, rusak berat), informasi tentang piutang daerah, hambatan pemungutan dan penagihan piutang daerah, tingkat suku bunga pinjaman pemda, hasil keuntungan badan usaha milik daerah, dlsb.
1. Peningkatan daya banding internal dan ekstern atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, penerapan prinsip dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun. Disamping itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah, agar mampu memberikan pedoman penerapan sistem akuntansi yang seragam antar daerah, sehingga mampu dilakukan pembandingan informasi secara eksternal antar LKPD satu dengan LKPD lainnya.
2. Dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan pemahaman laporan keuangan antara penyusun dan pengguna, maka Laporan keuangan sebaiknya dilengkapi dengan analisis laporan keuangan yang menguraikan pencapaian kinerja dan perkembangan kondisi keuangan masing-masing LKPD. Analisis laporan keuangan akan lebih membantu manajemen dalam pengambilan keputusan,karena lebih menggunakan pendekatan dan bahasa manajemen daripada pendekatan dan bahasa teknis akuntansi.

**DAFTAR PUSTAKA**

* Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
* Cohen, Stevan, William Eimicke, Tanya Heikkila.2011. Menjadi Manajer Publik Efektif. Jakarta. PPM Manajemen,.
* [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Opini WTP atas LKPD Meningkat, 12/10/2012 – 16:34
* Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi 2011, Bekasi.

*\*) Penyusun adalah Widyaiswara Madya Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, BPKP.*